



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Tax Avoidance mendesak untuk diteliti karena *Tax Avoidance* masih dilakukan di Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia (<http://www.wartaekonomi.co.id/read304811>). Banyak Perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak.

Tax avoidance menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain dengan adanya tindakan penghindaran pajak tersebut penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya (Winata, 2014).

Perkembangan pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan didalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Mulyani et al, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik Fahriani, (2015).

Menurut data dari Kementerian Keuangan data APBN 2019 (<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>) pertumbuhan penerimaan pajak 2017 dari perusahaan (PPh Badan) sebesar 16,61% dan pada 2018 pertumbuhan penerimaan dari PPh Badan meningkat menjadi 22,12% yang berarti pertumbuhan penerimaan pajak dari Januari 2017 – November 2018 terjadi peningkatan sebesar 5,51%, tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan peningkatan dari Januari 2018 – November 2019 turun menjadi 1,18%.

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak, pendapatan pajak sudah dianggap hampir optimal karena persentase pertumbuhan penerimaan pajak 2018 - 2019 sebesar 1,18% dalam arti wajib pajak telah tertagih sesuai dengan perhitungan sehingga tidak terjadi peningkatan penerimaan pajak. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang diterapkan, kondisi ini merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak Sandy dan Lukviaman, (2015).

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Praktik penghindaran pajak mungkin saja



menjurus pada upaya penggelapan pajak, hal itu tentu akan memberikan efek negatif bagi negara, karena apabila dibiarkan terus menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan dan akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Perusahaan Publik di Indonesia masih banyak yang melakukan *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa *corporate governance* belum dilakukan dengan maksimal (Maharani dan Suardana, 2014).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun pada tahun 2020. Temuan ini diumumkan oleh Tax Justice Network yang diperkirakan merugikan Indonesia sebesar US\$ 4,86 miliar pertahun, kurs yang digunakan saat penutupan pasar spot senin (22/11) sebesar Rp. 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dari laporan tersebut Tax Justice Network menyatakan Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. (<http://www.nasional.kontan.co.id/news>).

Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *good corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. Isu mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Menurut *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* dalam Fadhilah (2014). *Corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer , 2006 dalam Winata, 2014).

Corporate governance yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam undang-undang terdapat zona abu-abu yang memungkinkan perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum pajak yang dianggap ambigu oleh wajib pajak membuat wajib pajak secara tidak langsung memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Winata, 2014).

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Dalam Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia”, secara spesifik perusahaan yang berhubungan dengan manufaktur yang berhubungan dengan manufaktur logam yang di proyeksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.



B. Identifikasi Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah karyawan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah Manajemen pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi batasan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek objek, objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor manufaktur logam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada periode 2017-2019.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia?”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami hubungan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep yang melandasi penelitian.

Konsep yang akan dibahas meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

A. Telaah Pustaka

1. Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Budiman, 2012 dalam Mulyani et al, 2018). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014 dalam Mulyani et al, 2018). Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Harto, 2014 dalam Mulyani et al, 2018).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*Tax Avoidance*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*Tax Evasion*). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam suatu peraturan perpajakan (Suandy dalam Mulyani et al, 2018).



2. Corporate Governance

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a. Beberapa definisi tentang *Good Corporate Governance* (Gunawan, 2016:45):
 - (1) *Cadbury Report* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai: “*The system by which organisations are directed and controlled. (Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).*”
 - (2) *Cadbury Committee* memandang *good corporate governance* sebagai: “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka).*”
 - (3) *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai: “*The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja).*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Tjager dkk menyimpulkan bahwa *good corporate governance* pada intinya adalah: “Mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.”

- b. Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006):

- (1) Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian divisi dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Sandy dan Lukviarman, 2015). Kepemilikan saham

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



instiusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

4. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014).

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Winata, 2014). Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tax avoidance dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah persentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi (Winata, 2014).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Kualitas Audit

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Penelitian menggunakan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst dan Young-* EdanY akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Khoirunnisa 2016 dalam Mulyani et al, 2018).

6. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Fadhilah, 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan

semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Winata, 2014)

B. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Mulyani et al, (2018) menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh positif dan signifikan, tidak berpengaruh positif namun signifikan, dan negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Mulyani et al, (2018) yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance” ada beberapa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan seperti Kepemilikan Institutional, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur” dimana penelitian yang dilakukan Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, (2014) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011)” dan penelitian Winata, (2014) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013”.

Hasil penelitian Mulyani et al, (2018), Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* hal ini sejalan dengan penelitian Sandy dan Lukviarman, (2015) dimana dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Winata, (2014) Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sejalan dengan penelitian Fadhilah, (2014) yang berarti tinggi atau rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris tidak memberikan dampak terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyani et al, (2018), Kualitas Audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) dimana Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, Sedangkan hasil penelitian Fadhilah, (2014) sejalan dengan penelitian yang dilaukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) dimana penelitian yang dilakukan memberikan hasil Kualitas Audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winata, (2014) berbeda dengan yang lain dimana Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyani et al, (2018), Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman, (2015), Winata, (2014), dan Fadhilah, (2014).

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang *Tax Avoidance*:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance
Nama Peneliti	Sri Mulyani, Anita Wijayanti & Endang Masitoh
Tahun	2018
Variabel	Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif dan Signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Kualitas Audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 4. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
--	---

<p>Judul</p>	<p>Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Syeldila Sandy & Niki Lukviarman</p>
<p>Tahun</p>	<p>2015</p>
<p>Variabel</p>	<p>Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit</p>
<p>Hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

1. Ditarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013
Nama Peneliti	Fenny Winata
Tahun	2014
Variabel	Kepemilikan Institutional, Presentase Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Jumlah Komite Audit
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institutional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh tingkat signifikan 10% terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

Judul	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011)
Nama Peneliti	Rahmi Fadhillah
Tahun	2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Variabel</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Proporsi Kepemilikan Institutional, Proporsi Presentase Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit</p>
<p>Hasil</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2011. 2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2011. 3. Kualitas Audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 2011. 4. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2011.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

1. Hubungan Kepemilikan Institutional dengan *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014). Berdasarkan penelitian Mulyani et al (2018) Kepemilikan Institutional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, menurut Sandy dan Lukviarman (2015), Winata (2014) dan Fadhilah (2014) Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Wardhani (2006) menyatakan salah satu permasalahan dalam penerapan *corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen (*independent commissioner*) yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*). Berdasarkan penelitian Mulyani et al, (2018) , Fadhilah, (2014) Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan, menurut Sandy dan Lukviarman (2015), Winata (2014) Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu pengukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012). Berdasarkan penelitian Mulyani et al, (2018), Sandy dan Lukviarman (2015), dan Fadhilah (2014) kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan menurut Winata (2014) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

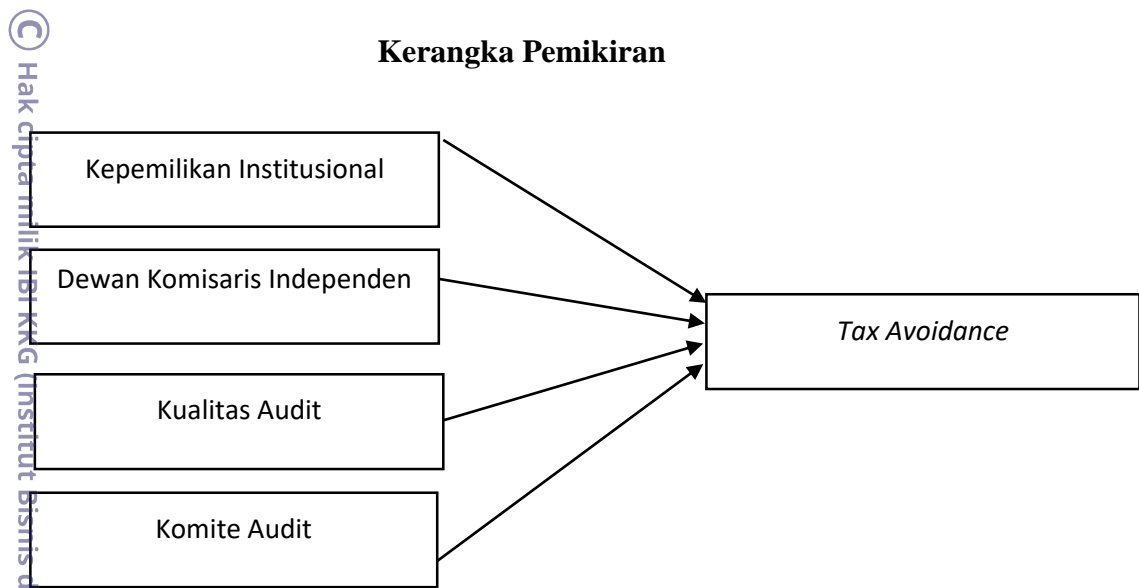
Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014). Berdasarkan penelitian Mulyani et al (2018), Sandi dan Lukviarman (2015), Winata (2014) dan Fadhilah (2014) Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1



© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal di atas, penulis menduga bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₂ = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₃ = Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₄ = Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB III

Metodologi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Obyek Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada perusahaan manufaktur logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 2010 yang berjumlah 11 perusahaan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dan diambil dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Desain Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian menurut Cooper dan Schindler (2014;126), yaitu :

1. Tingkat Perumusan Masalah

Berdasarkan tingkat perumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam studi formal dikarenakan penelitian ini dimulai dari dengan suatu hipotesis atau pertanyaan riset yang kemudian melibatkan prosedur dan spesifikasi sumber data yang tepat. Riset formal sendiri bertujuan untuk menguji hipotesis atas pertanyaan riset yang diajukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diterbitkan oleh perusahaan sampel dari tahun 2017 sampai 2019. Data diperoleh

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Pengendalian Variabel

Penelitian ini memiliki desain laporan sesuai fakta, dikarenakan pengamat tidak memiliki kontrol atas variabel dalam pengertian bahwa peneliti tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasinya. Variabel yang digunakan oleh peneliti adalah kepemilikan institutional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan *tax avoidance*.

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kausal. Analisis kausal atau analisis sebab akibat sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan bagaimana satu variabel mempengaruhi, atau “bertanggung jawab atas” perubahan yang terjadi pada variabel lain. Dalam analisis kausal, agar analisis tersebut memenuhi standar ideal sebagai penyebab, maka persyaratan bahwa satu variabel harus selalu menyebabkan terjadinya satu variabel lainnya, dan tidak ada variabel lain yang memiliki dampak sebab akibat yang sama, harus dipenuhi. Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh dari variabel *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Dimensi Waktu

- Penelitian ini menggunakan studi longitudinal yaitu studi yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mempelajari sampel dalam periode 2017, 2018, dan 2019.

6. Ruang Lingkup Topik Bahasan

Penelitian ini menggunakan studi statistik. Studi ini berupaya memperoleh karakteristik populasi dengan membuat kesimpulan dari karakteristik sampel. Kesimpulan hasil temuan ditentukan berdasarkan besar kecilnya tingkat representatif dan validitas sampel.

7. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan lingkungan aktual (kondisi lapangan). Objek penelitian dari penelitian ini diambil sesuai kondisi aktual yang terdaftar dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia.

8. Kesadaran Partisipan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disediakan maka berdasarkan kesadaran partisipan, penelitian ini tidak menyebabkan penyimpangan yang berarti bagi partisipan untuk melakukan kegiatan sehari – hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Variabel ini di proksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif pajak efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal dimana pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan sebesar 25%, bila hasil ETR berada dibawah maupun diatas 25% maka perusahaan diindikasi melakukan *tax avoidance* karena pembayaran pajak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. ETR dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan (Sandy, 2015).

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institutional adalah kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan diatas 5% selain kepemilikan manajerial.

Kepemilikan instituonal dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki intitusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan (Fadhilah, 2014). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur menggunakan presentase kepemilikan institusional .

3. Dewan Komisaris Independen

Dalam penelitian ini proporsi dewan komisaris dihitung dari presentase jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan yang dijadikan sampel. Berikut cara perhitungannya :

$$\text{Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$$

Proporsi Dewan Komisaris pada penelitian ini diukur berdasarkan penelitian dari (Rahmawati dkk, 2016).

4. Kualitas Audit

Dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy* dengan nilai 1 atau 0, perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y* akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0. Kualitas audit dilambangkan dengan audit (Fadhilah, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Komite Audit

Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Fadhilah, 2014). Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah teknik observasi dengan studi pengamatan terhadap data sekunder pada laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Data yang berhubungan dengan informasi perusahaan yang dibutuhkan bagi penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang dipakai dalam mengambil sampel adalah dengan cara *judgment sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan sampel menggunakan metode *judgment sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang *representative* berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel yang dipertimbangkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tabel 3.1

Judgement Sample

No.	Kriteria
1	Perusahaan manufaktur logam yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2010.
2	Perusahaan yang akan diambil sampelnya menerbitkan laporan keuangan tahun 2017, 2018 dan 2019.
3	Perusahaan mengungkapkan proporsi saham yang dimiliki institusi, jumlah dewan komisaris independen, dan komite audit yang dipakai oleh perusahaan tersebut.
4	Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki laporan tahunan yang <i>valid</i> selama periode 2017, 2018,2019.

Tabel 3.2

Tabel Penarikan Sampel

Keterangan	Total
Perusahaan manufaktur logam yang terdaftar dalam BEI	17
Perusahaan logam yang belum terdaftar sampai dengan tanggal 1 Januari 2010	(5)
Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan yang <i>valid</i>	(1)
Total Perusahaan Sampel	11

Sumber : www.idx.id (dikembangkan untuk penelitian ini)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah uji kesamaan koefisien untuk mengetahui apakah uji *pooling* dapat dilakukan, selain itu penguji juga menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel. Peneliti juga menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya untuk menguji uji F dan uji t, serta pengaruh dua atau lebih variabel bebas

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 25.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Uji Kesamaan Koefisien (*Pooling*)

Menurut Ghozali (2016) uji kesamaan koefisien dilakukan untuk mengetahui apakah *pooling* data penelitian (penggabungan *cross-section* dan *time series*) dapat dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *intercept*, *slope*, atau keduanya diantara persamaan regresi. Uji kesamaan koefisien dapat dinyatakan lolos uji jika nilai signifikan lebih besar dari 0.05. Apabila terbukti terdapat perbedaan *intercept*, *slope*, atau keduanya diantara persamaan regresi, maka data penelitian tidak dapat di-*pool* melainkan harus diteliti secara *cross sectional*. Sedangkan jika tidak terdapat perbedaan *intercept*, *slope*, atau keduanya diantara persamaan regresi, maka *pooling* data dapat dilakukan.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) statistik adalah gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi mengenai variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam bentuk statistik.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2016:154), Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dilakukan dengan langkah-langkah:

(1) Hipotesis

Ho : data berdistribusi secara normal

Ha : data tidak berdistribusi secara normal

(2) Menentukan tingkat kesalahan (α) = 0,05 (5%)

(3) Kriteria pengambilan keputusan:

Suatu variabel dikatakan berdistribusi secara normal jika memiliki tingkat kesalahan lebih besar 0,05 (5%) dan suatu data dikatakan tidak terdistribusi normal jika memiliki tingkat kesalahan lebih kecil 0,05.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) “uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditentukan pada data runtut waktu (*time series*) karena



“gangguan” pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu, kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016) multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen. Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* < 0,1 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila *tolerance value* > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghazali (2016:134) uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah:

(1) Menentukan tingkat kesalahan (α) = 0,05 (5%)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Memperoleh nilai Sig. Pada tabel *coefficients*
- (3) Kriteria pengambilan keputusan:
 - (a) Jika nilai Sig. < α (5%), maka dalam model regresi terjadi heterokedastisitas
 - (b) Jika nilai Sig. > α (5%), maka dalam model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Uji F

Menurut Ghozali (2016:96) Uji statistik atau sering juga disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan (Sig.) F yang dibandingkan dengan batas signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5 %), maka hipotesis pengujian adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Jika nilai F signifikan secara statistik maka hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai F tidak signifikan secara statistik maka semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Uji t

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

6. Model Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016) metode regresi linear berganda yaitu metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat bertujuan untuk menghubungkan satu variabel terikat (dependen) dan beberapa variabel bebas (independen). Adapun model yang digunakan dalam regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

α_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



X1	= Kepemilikan Institusional
X2	= Dewan Komisaris Independen
X3	= Kualitas Audit
X4	= Komite Audit
ε	= Error

7. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pada penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²* untuk mengukur besarnya

Koefisien determinasi. Nilai R^2 yang kecil menggambarkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Nilai koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, dimana:

- Jika $R^2 = 0$, menandakan bahwa model regresi yang terbentuk tidak sempurna, dimana variabel-variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen.
- Jika $R^2 = 1$, menandakan bahwa regresi yang terbentuk sempurna, dimana variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen dengan tepat.
- Jika R^2 mendekati 1, semakin tepat model regresi yang terbentuk untuk memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur khususnya logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2019 yang berjumlah 11 perusahaan.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses analisis dan pembahasan konseptual berdasarkan hipotesis yang telah diterima atau ditolak pada sub bab hasil penelitian dan juga akan disajikan hasil pengujian data yang mendukung kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 lebih spesifik perusahaan manufaktur logam. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 3 tahun, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Untuk kriteria sampel telah dijabarkan dalam Bab III. Jumlah sampel yang telah memenuhi kriteria sebanyak 11 perusahaan.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Kesamaan Koefisien (*Pooling*)

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.1, maka dapat dilihat seluruh variabel yang berinteraksi dengan variabel dependen memiliki nilai Sig. lebih besar dari *p-value* (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada



perbedaan garis diagonal sepanjang tahun, sehingga data dapat di-*pool* yang

C artinya uji *pooling* data dapat dikatakan lolos uji.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2 maka dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Variabel kepemilikan institutional yang diwakilkan dengan X1 memiliki nilai *mean* 78,9091, nilai standar deviasi yaitu sebesar 14,30770, jumlah data yang dimasukkan sebesar 33.
- b. Variabel dewan komisaris independen yang diproksikan dengan X2 memiliki nilai *mean* 37,5455, nilai standar deviasi yaitu sebesar 8,40049, jumlah data yang dimasukkan sebesar 33.
- c. Variabel kualitas audit yang diproksikan dengan X3 memiliki nilai *mean* 0,18, nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,392, jumlah data yang dimasukkan sebesar 33.
- d. Variabel komite audit yang diproksikan dengan X4 memiliki nilai *mean* 3, nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,25, jumlah data yang dimasukkan sebesar 33.

3. Uji asumsi klasik ini dalam penelitian untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

- a. Uji Normalitas Data

Pengujian Normalitas data dalam penelitian ini menggunakan statistik *Kolmogorov – Smirnov Test* dengan menggunakan tarif signifikansi 0,05



sehingga data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05, berdasarkan table 4.3 diketahui nilai signifikansi adalah 0,143 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal.

Penelitian kedua berdasarkan Imam Gozali (2016: 156) model regresi dikatakan normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal Seperti yang terlihat pada table 4.4 tidak ada titik yang berada jauh dari garis, maka berdasarkan Imam Gozali (2016: 156) model regresi dikatakan normal.

b. Uji Autokorelasi

Untuk menentukan apakah terjadi autokorelasi dalam penelitian ini, hasil penelitian harus mengacu pada table Durbin-Watson. Menurut Imam Gozali (2016 : 109) tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin-Watson terletak antara du sampai dengan $(4-du)$.

$$du = 1,730$$

$$\text{Durbin-Watson} = 1.890$$

$$4-du = 2,270$$

Dalam table 4.5 memperlihatkan angka 1,890 dalam Durbin-Watson yang berarti $du < d < 4-du = 1,730 < 1,890 < 2,270$ dimana Durbin-Watson 1,890 berada diantara du dan $4-du$, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas dilakukan dengan melihat perolehan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dari model regresi untuk masing-masing variabel bebas.

Berdasarkan table 4.6 uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10.

Tolerance X1 = 0,918 > 0,10 dan VIF X1 = 1,089 < 10

Tolerance X2 = 0,988 > 0,10 dan VIF X2 = 1,012 < 10

Tolerance X3 = 0,828 > 0,10 dan VIF X3 = 1,208 < 10

Tolerance X4 = 0,880 > 0,10 dan VIF X4 = 1,137 < 10

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak ada multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan grafik scatterplot apabila titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas akan disajikan dalam bentuk grafik scatterplot:

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa titik dan tidak membentuk pola khusus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji F

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat nilai sig diatas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit secara bersama – sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

b. Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya $> 0,05$. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.9.

Berikut penjabaran dari hasil uji statistik t pada table 4.9 bagi pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen:

(1) Sig. X1 = $0,256 > 0,05$

Kepemilikan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

(2) Sig. X2 = $0,368 > 0,05$

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

(3) Sig. X3 = $0,003 < 0,05$

Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

(4) Sig. X4 = $0,825 > 0,05$

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 61,681 - 0,425 X_1 - 0,551 X_2 - 46,101 X_3 + 4,774 X_4 + \varepsilon$$

d. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Berdasarkan data pada tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa 28,2% variabel Y dalam penelitian ini dapat ditentukan oleh variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit.

C. Pembahasan

Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan mengenai hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 : Kepemilikan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar $0,256 > 0,05$.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bukti ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak (tidak tolak HO), hal ini menunjukkan bahwa tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





rendahnya *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institutional, dengan kata lain besar atau kecil persentasi saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham diterbitkan atau saham beredar tidak memberikan dampak terhadap perilaku *tax avoidance*. Hasil ini penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, (2014) dan Winata, (2014).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Hipotesis 2: Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar $0,368 > 0,05$.

Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bukti ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak (tidak tolak H_0), hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel dewan komisaris independen, dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris tidak memberikan dampak terhadap perilaku *tax avoidance*. Hasil ini penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, (2014).

3. Hipotesis 3: Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar $0,003 < 0,05$.

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Bukti ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima (Tolak H_0), hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *tax avoidance* ditentukan oleh variabel kualitas audit, dengan kata lain kualitas audit yang baik memberikan dampak terhadap perilaku *tax avoidance*. Hasil ini penelitian ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sesuai dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan

© Lukviarman, (2015) dan Fadhilah, (2014).

4. Hipotesis 4: Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar $0,825 > 0,05$.

Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bukti ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H4) ditolak (tidak tolak HO), hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel komite audit, dengan kata lain tinggi atau rendahnya jumlah komite audit tidak memberikan dampak terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hasil ini penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al, (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB V

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya untuk meneliti apakah kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka berikut ini saya sampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kepemilikan institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.
2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2019
3. Kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2019
4. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019

B. Saran

1. Sampel penelitian yang dilakukan ini tidak dapat digeneralisasi untuk sektor manufaktur karena hanya menggunakan perusahaan logam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Untuk akademisi yang mau tertarik terhadap topik penelitian ini sebaiknya menggunakan atau menambahkan variabel lain agar dapat meningkatkan nilai *Adjusted R²*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. A. dan Kurniasih, L., (2012), Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei: 123-132.

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*, New York: McGraw-Hill.

Fadhilah, Ramli (2014), *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*, Jurnal Universitas Negeri Padang. Jurnal Akuntansi. Volume 2, no. 1 (2014)

Fatharani, N. 2012. Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Fahriani, M. 2016. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 7, Juli 2016.

FCGI. (2006). *Corporate Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia*. Jakarta.

Gunawan, Robertus M. Bambang (2016). *GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance) : Konsep dan Penerapannya*, Jakarta : Rajawali Pers, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada.

Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, Umi dan Puji Harto. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3. No. 2. Pp. 1-12.

Hidayat, K (2020), Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp. 68,7 triliun dari Penghindaran Pajak, diakses 25 Januari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perekonomian Indonesia dan APBN 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>. Diakses tanggal 8 Januari 2021.

KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.

Maharani, IG.A.C. and K.A. Suardana (2014). “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur”. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2, hlm 525-539.

Hak cipta milik IBI KK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mulyani Sri, Wijayanti Anita, dan Masitoh Endang (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol.3 No.1 2018.

Rahmawati, dkk. 2016. *Pengaruh Pengungkapan Corporate social responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1 2016.

Sandy, Syeldila & Lukviarman Niki (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI* Volume 19 No.2, Desember 2015: 85-98.

Wartaekonomi.co.id, banyak perusahaan hindari hingga gelapkan pajak sri mulyani geram, <https://www.wartaekonomi.co.id/read304811/banyak-perusahaan-hindari-hingga-gelapkan-pajak-sri-mulyani-geram>. Diakses tanggal 16 Januari 2021.

Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.

Winata F. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*. Vol. 4. No. 1, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

NO	SEKTOR MANUFAKTUR	Tahun	Kepemilikan Institutional (X1)	Dewan Komisaris Independen (X2)	Kualitas Audit (X3)	Komite Audit (X4)	Tax Avoidance (Y)
			(%)	(%)	1 / 0	TOTAL	%
1.	PT. ALAKASA INDUSTRINDO, TBK	2017	0,94	0,33	0	3	0,04
	PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, TBK	2017	0,79	0,50	0	3	-0,79
	PT. BETON JAYA MANUNGGAL	2017	0,89	0,50	0	3	0,23
2.	PT. CITRA TUBINDO, TBK	2017	0,88	0,33	1	4	-0,23
	PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY	2017	0,77	0,25	0	3	0,26
	PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS, TBK	2017	0,61	0,50	0	3	0,00
3.	PT. LION METAL WORKS, TBK	2017	0,58	0,33	0	3	0,54
	PT. LIONMESH PRIMA, TBK	2017	0,52	0,33	0	3	0,26
	PT. Pelat Timah Nusantara, TBK	2017	0,85	0,33	0	3	0,06
4.	PT. PELANGI INDAH CANINDO, TBK	2017	0,94	0,33	0	2	0,11
	PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, TBK	2017	0,85	0,40	1	3	-0,30
	PT. ALAKASA INDUSTRINDO, TBK	2018	0,94	0,33	0	3	0,00
5.	PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, TBK	2018	0,79	0,50	0	3	0,53
	PT. BETON JAYA MANUNGGAL	2018	0,89	0,50	0	3	0,19
	PT. CITRA TUBINDO, TBK	2018	0,88	0,33	1	3	-0,22
6.	PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY	2018	0,81	0,33	0	3	0,38
	PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS, TBK	2018	0,61	0,50	0	3	0,02
	PT. LION METAL WORKS, TBK	2018	0,58	0,25	0	3	0,39
7.	PT. LIONMESH PRIMA, TBK	2018	0,53	0,25	0	3	0,43
	PT. Pelat Timah	2018	0,85	0,33	0	3	-0,12

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nusantara, TBK						
		PT. PELANGI INDAH CANINDO, TBK	2018	0,94	0,33	0	3	0,12
		PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, TBK	2018	0,85	0,40	1	3	-0,25
		PT. ALAKASA INDUSTRINDO, TBK	2019	0,92	0,33	0	3	0,26
		PT. ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, TBK	2019	0,86	0,50	0	3	0,07
		PT. BETON JAYA MANUNGGAL	2019	0,90	0,50	0	3	0,53
		PT. CITRA TUBINDO, TBK	2019	0,90	0,33	0	3	0,52
		PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY	2019	0,81	0,33	0	3	0,30
		PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS, TBK	2019	0,61	0,50	0	3	0,61
		PT. LION METAL WORKS, TBK	2019	0,58	0,33	0	3	0,84
11		PT. LIONMESH PRIMA, TBK	2019	0,53	0,33	0	3	-0,02
		PT. Pelat Timah Nusantara, TBK	2019	0,85	0,33	1	3	-0,31
		PT. PELANGI INDAH CANINDO, TBK	2019	0,94	0,33	0	3	0,21
		PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, TBK	2019	0,85	0,40	1	3	-0,25

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 2
Tabel 4.1
Uji Pooling
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	152.330	127.555		1.194	.246
	Kepemilikan Institutional (X1)	-.321	.613	-.137	-.524	.606
	Dewan Komisaris Independen (X2)	.345	1.151	.086	.299	.768
	Kualitas Audit (X3)	-61.999	22.611	-.723	-2.742	.013
	Komite Audit (X4)	-34.528	47.747	-.179	-.723	.478
	X1_D1	-.350	.921	-.400	-.380	.708
	X2_D1	-2.362	1.559	-1.309	-1.514	.146
	X3_D1	32.357	32.949	.233	.982	.338
	X4_D1	28.695	30.442	1.199	.943	.357
	X1_D2	-.295	.892	-.339	-.331	.744
	X2_D2	-.323	1.509	-.177	-.214	.833
	X3_D2	22.738	32.204	.164	.706	.488
	X4_D2	6.508	28.527	.278	.228	.822

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (Y)

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistiks

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Avoidance (Y)	13.3636	33.57717	33
Kepemilikan Institutional (X1)	78.9091	14.30770	33
Dewan Komisaris Independen (X2)	37.5455	8.40049	33
Kualitas Audit (X3)	.18	.392	33
Komite Audit (X4)	3.00	.250	33

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

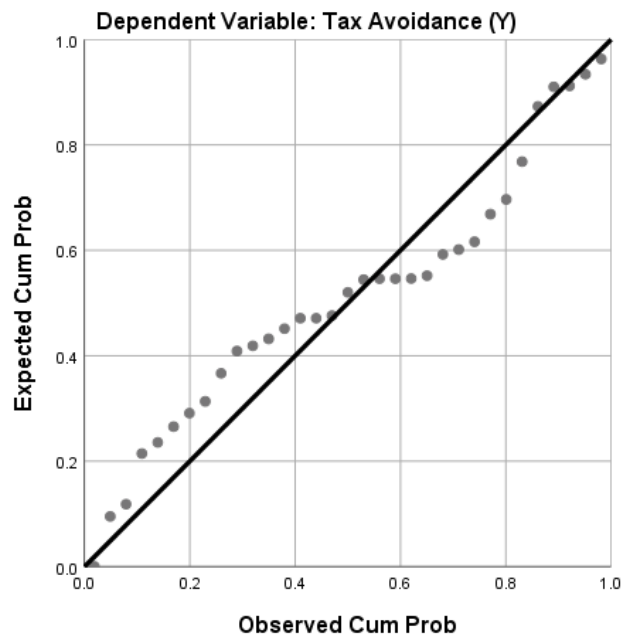
Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	26.61745956
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.130
	Negative	-.134
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.143 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 4.4
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.282	28.45526	1.890

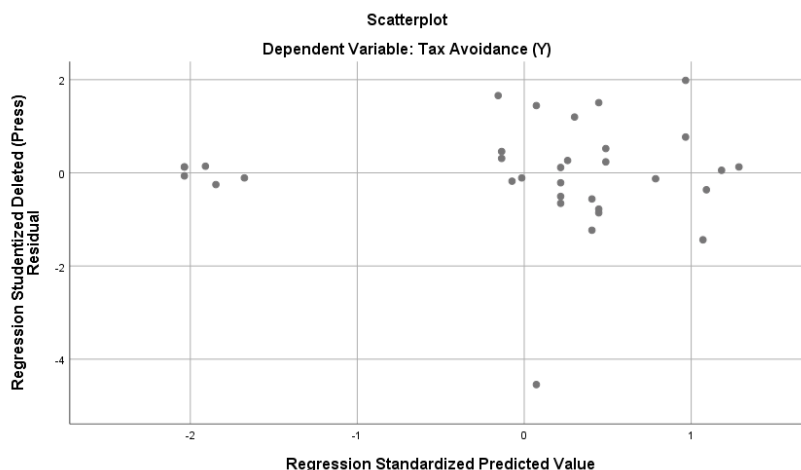
- a. Predictors: (Constant), Komite Audit (X4), Dewan Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institutional (X1), Kualitas Audit (X3)
- b. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistiks		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	61.681	75.470			.817	.421		
Kepemilikan Institutional (X1)	-.425	.367	.181		-1.160	.256	.918	1.089
Dewan Komisaris Independen (X2)	-.551	.602	.138		-.915	.368	.988	1.012
Kualitas Audit (X3)	-46.101	14.118	.538		-3.265	.003	.828	1.208
Komite Audit (X4)	4.774	21.451	-.036		.223	.825	.880	1.137

- a. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas





Tabel 4.8

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13405.983	4	3351.496	4.139	.009 ^b
	Residual	22671.653	28	809.702		
	Total	36077.636	32			

a. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

b. Predictors: (Constant), Komite Audit (X4), Dewan Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institutional (X1), Kualitas Audit (X3)

Tabel 4.9

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	61.681	75.470		.817	.421
	Kepemilikan Institutional (X1)	-.425	.367	-.181	-1.160	.256
	Dewan Komisaris Independen (X2)	-.551	.602	-.138	-.915	.368
	Kualitas Audit (X3)	-46.101	14.118	-.538	-3.265	.003
	Komite Audit (X4)	4.774	21.451	.036	.223	.825

a. Dependent Variabel: Tax Avoidance (Y)

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.610 ^a	.372	.282

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.